

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Afrianto, Eddy, *Kamus Istilah Perikanan*, Bandung: Kanisius, 1996.
- Akhmad, Fauzi, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*, Jakarta: Gramedia, 2005.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Anwar, Chairul, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1998.
- “Anonim” Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, *Laporan akhir analisis dan evaluasi hukum tentang perizinan penangkapan ikan dan sumber daya hayati laut lainnya*, Jakarta, 1995/1996.
- Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidanan dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Djalal, Hasjim, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Bandung: Bina Cipta, 1979.
- Hersutanto, Begi, *Problematika Sinergi dalam Grand Design Nasional Kebijakan Keamanan Laut*, Jakarta: CSIS, 2007.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2008.
- Kamil Ariadno, Melda, *Hukum Internasional Hukum Yang Media*, Jakarta: Media, 2007.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Bina Cipta 1981.
- Kusumastanto, Tridoyo, *Revitalisasi Perikanan Dan Kelautan Secara Berkelanjutan*, Bogor: Institute Pertanian Bogor, 2006.
- Leonard, Marpaung, *Target Baru Illegal Fishing*, Jakarta: Gramedia, 2009.
- Lilik, Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoretis dan Praktik*, Bandung: PT. Alumni, 2008.

- Marpaung, Leden, *Tidak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Nawawi Arief, Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2006.
- Nikijuluw, Victor, *Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Ilegal*, Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 2008.
- Parthiana, Wayan, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Prakoso, Djoko, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Samekto, Adji, *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Shant, Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sumaryono, Joko, *Forum Koordinasi dan Konsultasi Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Patriot, 2007.
- Sunarso, Siswanto, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Supriadi, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Thontowi, Jawahir, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Tri Bawono, Djoko, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Bakti, 2002.

## **B. Sumber Lainnya**

“Anonim” Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.

Dirjen Perikanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, bahan pemaparan tentang *illegal fishing*, di Kejaksaan Agung RI, 30 Juni 2016.

Hasil wawancara dengan Drs. R. Asmara Jaya. MM, Hakim Ad-Hoc Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Sitohang, Tommy, *Masalah Illegal Unregulated Unreported Fishing dan Penanggulangannya melalui Pengadilan Perikanan*, Jurnal Keadilan, 2005/2006.

Surat Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, No 416/DJPSDKP/III/2016, Perihal Klarifikasi atas pengaduan masyarakat terkait peredaran kepiting secara illegal dari Tarakan ke Tawau Malaysia, 7 Maret 2015.

Surat Nota Dinas Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, No 819/DJPSDKP/III/2016, Perihal Klarifikasi atas pengaduan dari nelayan pulau meleu terkait aktifitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, 16 Maret 2016.

Surat Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, No 211/DJPSDKP/I/2016, Perihal Pelaksanaan pemusnahan / penenggelaman kapal perikanan pelaku *illegal fishing*, 22 Januari 2016.

Surat Nota Dinas Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, No 130/DJPSDKP/I/2016, Perihal Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Perikanan, 27 Januari 2016.

Surat Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Perihal Siaran Pers KKP, TNI-AL, POLRI sepakati SOP penanganan tindak pidana perikanan, 30 Desember 2015.

Surat Nota Dinas Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, No 1089/DJPSDKP/XII/201, Perihal Tindak lanjut penyelesaian kasus pelanggaran ekspor hasil perikanan, 2 Desember 2016.

Surat Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Perihal Siaran pers pengawasan mendukung pelarangan alat tangkap *pair trawl*, 6 Januari 2016.

Surat Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, No 1941/DJPSDKP/XII/2015, Perihal Pemberian SLO bagi nelayan cantrang di provinsi Lampung, 18 Desember 2015.

Surat Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, No. 951/DJPSDKP/XI/2015, Perihal Tindak lanjut kasus illegal fishing di Kabupaten Buton provinsi Sulawesi Tenggara, 7 November 2015.

Surat Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, No 302/DJPSDKP/VI/2016, Perihal Penangkapan tiga kapal perikanan asing, 2 Juni 2016.

Surat Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, No 400/DJPSDKP/VI/2016, Perihal Penanganan barang bukti dan awak kapal serta pemulangan nelayan, 13 Juni 2016.

Surat Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, No. 698/DJPSDKP/VII/2016, Perihal Laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat, 1 Juli 2016.

### C. Internet

<http://www.djpt.kkp.go.id>. 20 Mei 2015, *Apa Yang Dimaksud IUU Fishing*,

<http://mukhtar-api.blogspot.com/2012/07.html>. 31 Juli 2016, *illegal fishing*

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/.html>, 29 Juli 2016 *pengertian jenis-jenis dan tujuan*.

<http://ikanmania25.blogspot.com/2011/11.html>. 31 Juli 2016. *illegal-fishing*

<http://rokhmindahuri.info/2012/10/04>, 1 Agustus 2016 *selamatkan-indonesia-dari-iuu-fishing*.